

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Thailand merupakan salah satu sekutu strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara. Hubungan antara AS dan Thailand mulai berjalan secara signifikan dan substantif pada kisaran tahun 1945 hingga 1975. Pada periode ini, hubungan kedua negara didasarkan pada bidang pertahanan (Mungkandi, 1986). Dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II, Thailand yang menjadi bagian dari sekutu *Axis Power* menerima banyak tuntutan dari Inggris akibat dari kekalahan selama perang. AS kemudian menjadi negara yang memberikan dukungan dan pembelaan terhadap Thailand. Pada pembelaannya, AS mengutarakan pendapat bahwa Thailand belum menjadi negara kesatuan selama perang terjadi karena terdapat *Internal Free Thai Movements* yang mendukung kekuatan sekutu untuk melawan Jepang pada saat itu (Prasirtsuk, 2017). Hal ini kemudian menjadikan AS sebagai pemeran utama dalam menyelamatkan Thailand dari tuntutan negara yang kalah. Setelah dukungan dan pembelaan yang diberikan oleh AS, hubungan antara AS dan Thailand terjalin semakin erat. Kemudian, pada tahun 1946 setelah Thailand menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Thailand terus berupaya menyelaraskan diri dengan AS serta mengadopsi kebijakan luar negeri pro-AS dengan tujuan untuk melindungi profil internasional negara yang tidak stabil akibat kekalahan kekuatan poros (Chongkittavorn, 2019).

Kemudian, AS juga semakin menunjukkan dukungannya terhadap Thailand dalam arena internasional. Hubungan kedua negara semakin berlanjut setelah kemunculan Perang Dingin. Persaingan ideologis yang muncul pada saat Perang Dingin membuat AS khawatir bahwa Thailand dan negara-negara di Asia Tenggara lain dapat terpengaruh ideologi komunis. Oleh karena itu, untuk membendung penyebaran komunisme maka dibentuklah *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO) atau Pakta Manila. Berkaitan dengan Pakta Manila tersebut, pada tahun 1962 ditandatangani *Thanat-Rusk communiqué* yang bertujuan untuk memperkuat hubungan pertahanan antara AS dan Thailand secara khusus agar terlindung dari ancaman komunis (Chongkittavorn, 2019). Thailand kemudian dipandang sebagai negara garis depan utama dalam perang melawan komunisme. Selain itu, Thailand juga negara yang termasuk dalam membantu militer dan pembangunan AS yang substansial. Thailand memberikan dukungan peningkatan kekuatan tempur kepada AS selama Perang Vietnam. Hal ini dibuktikan dengan operasi udara militer AS yang dilakukan dari instalasi di Thailand dalam melawan Vietnam Utara dan Laos. Operasi ini diantaranya seperti pemboman, pengintaian, pengumpulan intelijen elektronik, pengawasan radar, hingga pengiriman tim darat secara rahasia ke Laos (Clemens, 2008).

Setelah Perang Vietnam berakhir, hubungan pertahanan yang terjalin antara AS dan Thailand masih terus berlanjut. Meskipun kedua negara tidak memiliki urgensi dan nilai strategis yang sama seperti sebelumnya (Chongkittavorn, 2019). Hubungan *military to military* antara AS dan Thailand tetap kuat dengan adanya berbagai latihan gabungan antara kedua negara tiap tahun. Salah satu latihan militer

gabungan yang cukup penting adalah latihan Cobra Gold. Latihan militer Cobra Gold merupakan latihan militer terbesar didunia serta menjadi acara rutin dalam kerja sama *military to military* AS dan Thailand selama hampir 30 tahun. Cobra Gold dimulai sejak tahun 1982, secara bertahap berkembang dari latihan bilateral AS dan Thailand menjadi mengikutsertakan beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Malaysia sebagai peserta penuh pada 2011. Cobra Gold ini dinilai oleh pejabat AS dan Thailand sebagai pilar kerja sama kedua negara. Pencapaian dari latihan ini terbukti berguna untuk misi militer seperti patroli gabungan jalur laut yang penting serta misi non pertempuran untuk pemberian bantuan pasca bencana (Lohman, 2011).

Selain latihan militer Cobra Gold, AS dan Thailand juga bekerja sama dalam dua latihan militer gabungan besar. Pertama adalah Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) yang merupakan latihan gabungan Angkatan Laut kedua negara. Kedua adalah Cope Tiger yang merupakan latihan dengan melibatkan Angkatan Udara AS dan Thailand. Hubungan pertahanan antara AS dan Thailand yang juga dinilai penting adalah International Military Education and Training Program (IMET). Program ini adalah program yang didanai oleh Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan hibah bagi Perwira dan Pejabat Sipil negara sekutu belajar di AS serta menerima pelatihan tambahan. Program ini kemudian membuat hubungan antara personel militer AS dan Thailand menjadi lebih kuat (Lohman, 2011). Hubungan kerja sama militer dan keamanan antara AS dan Thailand juga dijalin dalam penjualan senjata serta pendanaan militer. AS menjadi negara penyedia peralatan militer terdepan di Thailand. Salah satu penjualan dengan profil

tinggi meliputi penjualan helicopter Black Hawk dan pesawat tempur F-16 yang menjadi kontrak menguntungkan antara kedua negara (Lohman, 2011). Hal ini juga didukung oleh penjelasan Clemens (2008) bahwa kebanyakan peralatan militer yang digunakan untuk mendukung militer Thailand berasal dari AS. Pada situs U.S Departement of States juga dijelaskan bahwa penjualan peralatan militer ke Thailand mencapai sekitar 2,7 miliar USD. Penjualan peralatan militer yang signifikan sendiri meliputi kendaraan pengangkut infanteri Stryker, pengintaian serangan ringan AH-6i, helicopter UH-60M Black Hawk, UH-72A Lakota, *upgrade mid-life* pesawat F-16A / B Block 15, rudal RGM-84L Harpoon Block II dan *Evolved Sea Sparrow* (U.S Departement of States, 2020).

Aliansi antara AS dan Thailand dalam bidang pertahanan dapat dikatakan sebagai hubungan yang erat serta signifikan. Namun disisi lain, sejak tahun 2014 Thailand meningkatkan hubungan pertahanannya dengan Tiongkok. Peningkatan hubungan pertahanan antara Thailand dan Tiongkok pada tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa kerja sama militer yang terjalin. Salah satunya adalah kenaikan secara signifikan dalam kerja sama pembelian senjata konvensional dari Tiongkok. Kenaikan pembelian senjata konvensional dalam hal ini termasuk MBT, pengangkut personel lapis baja, dan kapal selam diesel. Berdasarkan fakta yang ada, penjualan senjata dari Tiongkok ke Thailand diperkirakan melampaui penjualan senjata AS ke Thailand. Penjualan senjata dari Tiongkok ke Thailand pada periode 2015-2017 mencapai sekitar 209 juta SIPRI TIV (*trend in value*). Sementara itu, penjualan senjata dari AS ke Thailand pada periode yang sama hanya mencapai senilai 102 juta SIPRI TIV, dalam artian kurang

dari setengah jika dibandingkan dengan penjualan senjata Tiongkok ke Thailand (Bischoff, 2019).

Selain itu, pada tahun 2014 perencanaan untuk mengakuisisi kapal selam juga ditingkatkan oleh Thailand. Sebelumnya, pada tahun 2008 Thailand menolak penawaran penjualan dua kapal selam milik Tiongkok. Namun, perencanaan akuisisi kembali ditingkatkan tahun 2014. Kemudian, pada tahun 2015 Thailand mengundang perusahaan asing untuk melakukan penawaran mengenai dua pasokan kapal selam dengan anggaran 1,03 miliar USD. Akan tetapi, Tiongkok kemudian memberikan penawaran kesepakatan paket yang tidak dapat ditandingi oleh negara lain. Tiongkok menawarkan tiga kapal selam baru S-26T dengan sistem yang dapat memungkinkan kapal untuk tetap tenggelam dalam waktu yang lama. Tiongkok menawarkan tiga kapal selam ini dengan anggaran harga yang setara seperti harga dua kapal selam. Hal ini juga dilengkapi dengan penawaran sistem tempur, pelatihan awak, dan periode pembayaran kembali sepuluh tahun. Keputusan Thailand pada 2015 untuk mengakuisisi tiga kapal selam diesel listrik dari Tiongkok dengan anggaran 1,03 miliar USD menjadi keputusan pengadaan pertahanan paling mahal dan signifikan bagi Thailand. Thailand juga menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melakukan hal ini (Storey, 2019).

Selain kapal selam, Thailand juga telah membeli peralatan militer lainnya dari Tiongkok sejak 2014. Peralatan militer tersebut seperti 34 pengangkut personel lapis baja, radar pencari artileri, dan *surface to air missiles*. Tak hanya itu, Thailand juga membeli tank tempur yang berasal dari Tiongkok. Pada 2016, Thailand menerima tawaran tank tempur dari Tiongkok. Kemudian, Thailand memesan 28 tank tempur

VT-4 milik Tiongkok. Selanjutnya, pada tahun 2017 pemerintah Thailand kembali memesan sekitar 20 VT-4 tambahan, sehingga totalnya menjadi 48 tank tempur dengan harga 280 juta USD. Selain itu, Thailand dan Tiongkok juga merencanakan kerja sama untuk mendirikan fasilitas produksi persenjataan bersama dengan transfer teknologi dari Tiongkok. Kerjasama ini terus dibicarakan secara lebih lanjut hingga tahun 2014, namun proses produksi bersama belum dimulai (Storey, 2019).

Peningkatan hubungan pertahanan antara Thailand dan Tiongkok juga dapat dilihat pada latihan militer gabungan dari kedua negara. Sejak tahun 2014, latihan gabungan militer kedua negara meningkat. Pertama, latihan pra-kudeta secara multilateral pada tahun 2014 dengan Tiongkok. Kemudian, Thailand juga mengundang Tiongkok untuk mengambil bagian dalam komponen bantuan sipil kemanusiaan. Tiongkok untuk pertama kalinya bergabung dalam komponen ini dengan mengirimkan 17 personel. Selanjutnya pada tahun 2015, latihan gabungan militer juga dilakukan dengan total lima latihan bersama yang terdiri dari satu latihan bilateral, dan empat multilateral. Latihan bilateral yang disebut sebagai *Falcon Strike 2015* menjadi latihan yang penting karena merupakan latihan bersama Angkatan Udara kedua negara untuk pertama kalinya (Bischoff, 2019). Tak hanya itu, Thailand sejak tahun 2014 juga meningkatkan kerjasama dalam pendidikan militer dengan Tiongkok. Jumlah Perwira Thailand yang mengikuti kursus militer di Tiongkok meningkat menjadi 30 hingga 50 orang per tahun. Jumlah ini merupakan setengah dari jumlah personel militer Thailand yang belajar di AS (Storey, 2019). Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis melihat bahwa terjadi peningkatan cukup signifikan dalam kerja sama pertahanan antara Thailand dan Tiongkok sejak 2014. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa pembahasan ini menjadi

penting mengingat Thailand merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan pertahanan erat dengan AS namun kemudian pada tahun 2014, justru mulai meningkatkan hubungan pertahanannya dengan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, penulis memiliki pertanyaan penelitian mengenai mengapa sejak tahun 2014, Thailand semakin memperkuat hubungan pertahanan dengan Tiongkok ditengah kerja sama militer yang telah terjalin secara signifikan dengan AS?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai alasan perubahan orientasi kebijakan pertahanan Thailand yang sejak tahun 2014 mulai mendekat ke Tiongkok. Penulis menilai bahwa penelitian ini penting mengingat Thailand yang selama ini menjadi sekutu strategis AS dalam hubungan pertahanan, kemudian sejak tahun 2014 justru mendekatkan diri dengan Tiongkok. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai alasan apa saja yang menyebabkan Thailand mendekatkan diri ke Tiongkok.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1. Realisme Neoklasik

Dalam menjelaskan alasan di balik peningkatan hubungan pertahanan antara Thailand dan Tiongkok sejak tahun 2014, penulis menggunakan pendekatan realisme neoklasik. Realisme neoklasik pada dasarnya tak jauh berbeda dengan

perspektif realisme, realisme neoklasik juga didasarkan pada asumsi bahwa Hubungan Internasional adalah sistem yang anarkis. Namun, pendekatan realisme neoklasik kemudian hadir dengan menggabungkan antara kerangka analitis dari elemen realisme klasik dan neorealisme. Pendekatan realisme neoklasik merujuk pada realisme klasik yang menekankan pada pentingnya kepemimpinan dan kebijakan luar negeri. Namun tak hanya itu, realisme neoklasik juga merujuk pada neorealisme terutama pemikiran Waltz yang menyatakan bahwa struktur sistem negara internasional dan kekuatan relatif negara itu penting (Jackson dan Sørensen, 2013). Secara eksplisit kemudian dapat dikatakan bahwa realisme neoklasik berupaya untuk mengkombinasikan variabel eksternal dan internal, melakukan pembaruan, serta mensistematisasikan pandangan tertentu yang diambil dari pemikiran realis klasik (Rose, 1998).

Para penganut realisme neoklasik cenderung tidak puas dan mengkritik cara realisme klasik dalam memandang suatu permasalahan. Realisme neoklasik tidak setuju dengan cara realis klasik dalam memandang bahwa kebijakan luar negeri selalu ditentukan oleh pengaruh dan batasan keadaan internasional. Pada realis klasik, keadaan internasional menjadi tekanan terpenting dalam kebijakan luar negeri. Hal ini kemudian membuat realisme neoklasik tidak puas dengan asumsi dari realisme klasik. Selain itu, para realis neoklasik juga berupaya untuk memperbaiki pandangan dari neorealisme dan memperkenalkan elemen-elemen yang telah ditinggalkan. Realisme neoklasik tetap ingin mempertahankan argumen struktural dalam neorealisme, namun disisi lain realis neoklasik juga menambahkan argumen instrumental dengan menekankan pada peran pemimpin negara (Jackson

dan Sørensen, 2013). Para realis neoklasik juga berupaya untuk menjelaskan bahwa anarki dan kekuasaan relatif negara memang membatasi negara, namun tidak mengatur kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemimpin negara. Oleh karena itu, hal ini pada akhirnya tidak mendikte kebijakan luar negeri suatu negara (Jackson dan Sørensen, 2013).

Secara lebih lanjut, realis neoklasik pada satu sisi juga berfokus untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam hubungannya dengan tekanan struktur internasional. Kemudian, disisi lain realis neoklasik juga berupaya menjelaskan tentang keputusan yang dibuat oleh pemimpin negara. Dalam penjelasannya, realis neoklasik juga memasukkan elemen yang sebelumnya diabaikan pada perspektif realis lain yakni mengenai karakteristik internal negara (Jackson dan Sørensen, 2013). Schweller (2018) menjelaskan bahwa realisme neoklasik tidak memberikan penolakan terhadap teori sistemik, melainkan menggabungkannya dengan teori tingkat domestik. Kemudian, realisme neoklasik juga berupaya melakukan eksplorasi proses internal negara tentang bagaimana negara sampai pada suatu kebijakan dan membuat keputusan tindakan untuk menghadapi ancaman serta peluang yang ada pada lingkungan eksternal mereka.

Selain itu, menurut Brawley (2009) realisme neoklasik memberikan penawaran wawasan terbaik tentang hasil. Realisme neoklasik memiliki asumsi bahwa negara merupakan pengelola sumber daya bangsa untuk kemudian dipersiapkan dalam persaingan pada lingkungan internasional yang anarkis. Negara menjadi mediator diantara dua ranah politik, yakni domestik dan internasional. Pada realisme neoklasik, negara diharuskan untuk mengoordinasikan diplomasi dan kebijakan

domestik serta memanfaatkan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan kekuatan militer demi pertahanan kepentingan. Namun, dalam hal ini para elit dan pemimpin negara tidak selalu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan ekstraksi dan mengarahkan sumber daya nasional seperti yang mereka inginkan. Analisis kekuasaan negara juga harus mempertimbangkan kekuatan serta struktur negara relatif terhadap masyarakat mereka karena hal ini berpengaruh pada seberapa besar sumber daya nasional yang dapat dialokasikan untuk kebijakan luar negeri. Sehingga, meskipun terdapat negara yang memiliki kekuatan yang sama akan tetapi struktur negara mereka berbeda maka tindakan atau kebijakan yang diambil juga berbeda (Rose, 1998). Berdasarkan penjelasan tentang realis neoklasik tersebut, untuk menjelaskan alasan yang mendukung Thailand memperkuat hubungan pertahanannya sejak 2014 dengan Tiongkok, penulis akan menggunakan pengaruh situasi domestik pada kerangka teoritis selanjutnya.

1.4.2. Pengaruh Situasi Domestik

Politik domestik menjadi salah satu bagian penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Scheweller (2004), politik domestik menjadi *intervening variable* dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri suatu negara diambil sebagian besar berdasar pada struktur domestik dan situasi politik khas yang ada dalam negara. Struktur domestik dan proses politik domestik yang kompleks berperan sebagai suatu penghubung yang menyalurkan dan mengarahkan pengambilan kebijakan sebagai tanggapan atas kekuatan eksternal. Kitchen (2010) juga mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara membutuhkan pertimbangan beberapa faktor domestik yang

beragam seperti pengelolaan sumber daya nasional, nilai-nilai nasional, dan diplomasi. Oleh karena itu, setiap negara selalu memiliki tanggapan berbeda meskipun tekanan dan peluang sistemik yang dihadapi sama.

Secara lebih lanjut, Scheweller (2004) dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat setidaknya empat variabel yang mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan luar negeri dan merespon ancaman eksternal. Keempat variabel yang dimaksud terdiri dari konsensus elit, kerentanan rezim, kohesi sosial, dan kohesi elit. Variabel pertama adalah konsensus elit yang menjadi penyebab paling dekat dari pengambilan kebijakan dan respon terhadap tekanan eksternal. Pada dasarnya, konsensus elit merujuk pada tingkat persepsi bersama elit dalam menghadapi permasalahan. Konsensus elit ini kemudian menjadi variabel dependen dalam pengambilan kebijakan luar negeri negara. Ketika terdapat konsensus diantara para elit, maka kemudian kebijakan diambil oleh negara untuk menanggapi suatu tekanan tertentu. Variasi konsensus elit kemudian juga menghasilkan preferensi kebijakan yang mempertimbangkan resiko, jangka waktu, dan pengambilan keuntungan (Scheweller, 2004).

Selanjutnya, terdapat variabel kedua yakni kerentanan rezim yang merupakan keadaan dimana pemerintah atau rezim menghadapi tantangan serius dari militer, partai politik oposisi, atau kelompok politik kuat lain yang ada pada negara. Pada kondisi seperti ini, para pemimpin yang rentan tidak dapat dengan mudah mengambil kebijakan untuk menghadapi ancaman eksternal. Dalam mengambil suatu kebijakan, para pemimpin yang rentan biasanya cenderung lebih dibatasi dibandingkan dengan pemimpin populer. Kemudian, pemimpin atau pemerintah

yang rentan juga memiliki lebih sedikit kapasitas kebijakan jika dibandingkan dengan pemerintah yang sah. Hal ini berarti bahwa pemerintah rentan kurang mampu untuk menilai ancaman, mengalokasikan sumber daya nasional dan mengartikulasikan serta memilih kebijakan. Selain itu, dalam rezim atau pemerintah yang rentan dapat mengubah kapasitas kebijakan menjadi kaku dan kurang efektif. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya penurunan dalam kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah, serta juga akan berdampak pada penurunan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi material dan sumber daya manusia ketika terjadi krisis keamanan nasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi suatu ancaman eksternal pemerintah atau rezim yang rentan akan cenderung mencari sekutu karena hal ini dinilai menjadi langkah cepat serta murah untuk menghadapi ancaman eksternal (Scheweller, 2004).

Kemudian, variabel ketiga menurut Scheweller (2004) adalah variabel kohesi sosial. Kohesi sosial dalam hal ini dapat dipahami sebagai keadaan ketika seluruh masyarakat merasa saling terintegrasi dan terhubung pada rangkaian luas jaringan yang membentuk masyarakat. Tingkat kohesi sosial dalam suatu negara dinilai dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menghadapi ancaman eksternal. Semakin tinggi tingkat kohesi sosial dalam negara, maka semakin besar kemungkinan negara untuk mampu menghadapi ancaman eksternalnya sendiri karena terdapat peningkatan dukungan publik serta kepatuhan rezim. Sebaliknya semakin rendah tingkat kohesi sosial dalam suatu negara, maka dalam menghadapi ancaman eksternal suatu negara akan mengambil kebijakan untuk mencari sekutu. Lalu, variabel terakhir yang mempengaruhi pengambilan

kebijakan adalah variabel kohesi elit. Kohesi elit sendiri merujuk pada sejauh mana politik pemerintah terfragmentasi. Suatu negara dengan elit yang terfragmentasi akan menghasilkan kebijakan yang tidak koheren dan tidak efektif. Selain itu, elit yang terfragmentasi dalam suatu negara juga akan meningkatkan risiko kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, para elit perlu untuk menyepakati kebijakan yang paling sesuai. Seperti misalnya, memutuskan negara mana yang menghadirkan ancaman paling besar dan dimana negara harus mengerahkan sumber daya militernya (Scheweller, 2004).

Selain itu, pertimbangan pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara juga berkaitan dengan ekonomi domestiknya. Pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor penentu cukup signifikan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara menentukan seberapa cepat suatu negara dapat menjadi kekuatan ekonomi utama (Bandopadhyaya, 1969). Tingkat kekuatan ekonomi suatu negara ini kemudian mempengaruhi negara dalam menentukan perannya pada dunia internasional. Kekuatan ekonomi negara membuat dinamika hubungan bilateral atau multilateral suatu negara berubah. Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa ekonomi suatu negara mempengaruhi penentuan hasil kebijakan luar negerinya dalam pencarian mitra untuk keamanan, perdagangan, serta investasi (Heo dan Roehrig, 2014).

1.5 Argumentasi Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka teori diatas, penulis memiliki argumentasi penelitian bahwa sejak tahun 2014, Thailand semakin memperkuat hubungan

pertahanannya dengan Tiongkok karena dipengaruhi oleh tiga alasan. Pertama adalah karena adanya kudeta militer pada situasi politik domestik Thailand pada tahun 2014. Kedua, dukungan Tiongkok terhadap Thailand meskipun telah terjadi kudeta militer pada 2014 dalam politik domestiknya. Ketiga, Thailand berupaya untuk memperluas kerja samanya dengan banyak negara. Ketiga alasan tersebut mempengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Thailand yang mendekat pada Tiongkok sejak tahun 2014.

1.6. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Kudeta Militer

Secara umum, kudeta dapat didefinisikan sebagai upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elit lainnya dalam aparaturnya dengan tujuan untuk menggeser eksekutif yang sedang menjabat (Powell dan Thyne, 2011). Secara lebih khusus, menurut Schiff (2009) kudeta militer dapat dipahami sebagai pertukaran kekuasaan oleh elit melalui kekuatan militer tanpa transformasi nasional yang signifikan. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Thompson (1972) bahwa kudeta militer pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika setiap kali anggota angkatan bersenjata reguler mencopot atau berupaya menggeser kepala eksekutif suatu negara melalui penggunaan ancaman atau kekuatan militer. Kudeta militer dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi atau memajukan kedudukan dari pemimpin kudeta terutama pada kondisi meningkatnya kerentanan rezim dan ancaman terhadap posisi serta sumber daya militer (Thompson, 1972). Berdasarkan definisi tersebut kemudian menjadi dasar bagi penulis dalam penggunaan istilah

kudeta militer pada penelitian ini, yakni upaya untuk menggeser kepemimpinan eksekutif negara dengan menggunakan ancaman atau kekuatan militer oleh angkatan bersenjata.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada ketiga alasan yang telah disebutkan dalam argumentasi penelitian terhadap peningkatan hubungan pertahanan antara Thailand dan Tiongkok pada tahun 2014. Adapun cakupan waktu dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2014 hingga 2017. Tahun 2014 dipilih karena Thailand mulai menunjukkan peningkatan hubungan pertahanan dengan Tiongkok pada tahun tersebut. Sedangkan, tahun 2017 dipilih karena Thailand telah mulai melakukan kerja sama pertahanan kembali dengan Amerika Serikat.

1.8. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif karena bertujuan untuk menjelaskan alasan peningkatan hubungan pertahanan antara Thailand dan Tiongkok sejak tahun 2014. Penelitian akan dilakukan dengan mencari korelasi antara adanya kudeta militer dalam politik domestik Thailand, dukungan Tiongkok terhadap Thailand sejak tahun 2014, dan upaya Thailand dalam memperluas kerja samanya dengan berbagai negara.

1.9. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder terkait kudeta militer Thailand, dukungan Tiongkok terhadap Thailand, serta upaya

perluasan kerja sama Thailand. Data primer diperoleh dari website dan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, berita, dan artikel yang kredibel dan relevan. Data-data tersebut kemudian akan menyediakan fakta-fakta empiris bagi penulis untuk digunakan dalam menjelaskan dan menganalisis alasan yang telah diuraikan dalam argumentasi penelitian.

1.10. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab kedua, ketiga, dan keempat berisi pembahasan berdasarkan argumentasi penelitian. Bab kedua membahas mengenai kudeta militer pada politik domestik Thailand tahun 2014. Bab ketiga membahas dukungan Tiongkok terhadap perekonomian Thailand pada saat kudeta militer terjadi. Bab keempat membahas mengenai upaya Thailand dalam perluasan kerja sama dengan banyak negara. Kemudian, bab kelima berisi kesimpulan dari keempat bab sebelumnya disertai dengan penjabaran relasi tiga alasan pada argumentasi penelitian. Bab kelima juga akan berisi penegasan kembali argumentasi penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah.